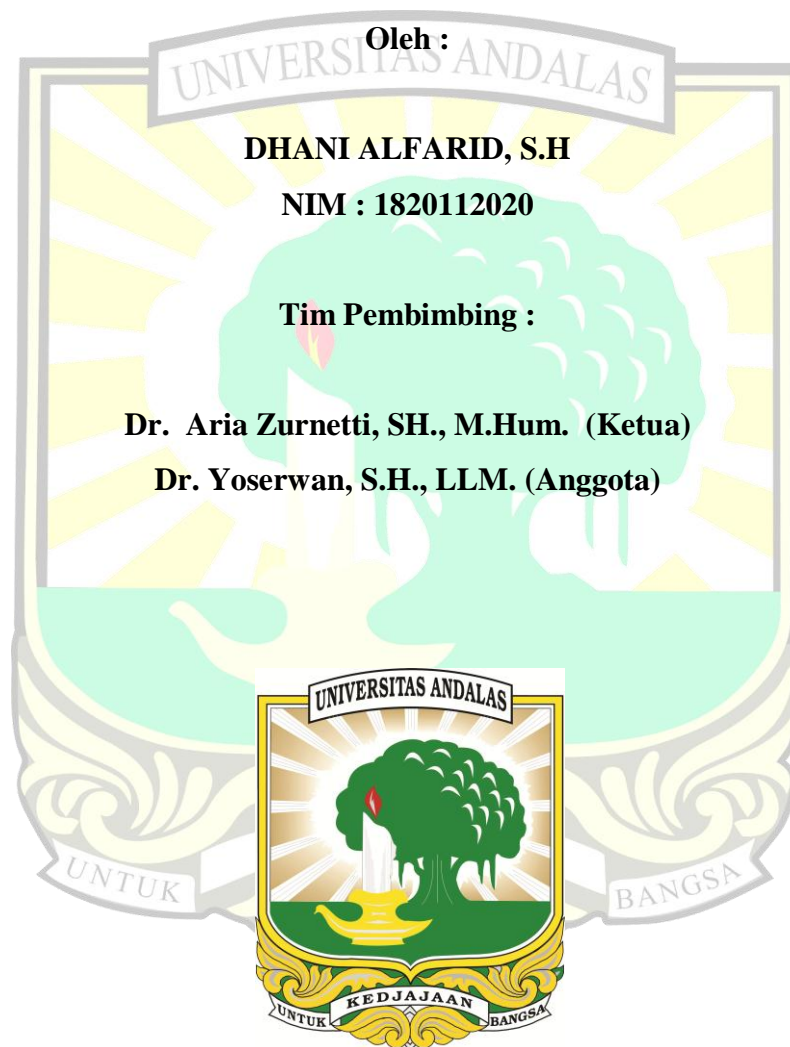


TESIS

**PENERAPAN REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PADA PERKARA NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN.PDG**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

**PENERAPAN REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PADA PERKARA NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN.PDG**

*(Dhani Alfarid, 1820112020, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 162 Halaman, 2020)*

ABSTRAK

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Ruang lingkup permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di tingkat penyidikan dan penuntutan pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkotika pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitiannya adalah deskriptif. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah 1) Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan tersangka adalah korban Penyalahguna Narkotika dengan pola pemakaian Reguler dan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Lembaga rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin selama 6 (enam) bulan pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg) belum dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut umum, karena tidak adanya peraturan yang tegas yang mewajibkan penyidik maupun penuntut umum untuk menempatkan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, sehingga kemanfaatan hukum dari pelaksanaan asesmen untuk tujuan pemulihan tidak dirasakan oleh tersangka dan atau terdakwa. 2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg belum sesuai dengan yang diamanatkan secara keseluruhan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu serta mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga tujuan hukum untuk memberi manfaat kepada terdakwa dalam rangka penyembuhannya tidak dapat dirasakan oleh terdakwa. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah agar penyidik dan penuntut umum lebih optimal dalam melaksanakan peraturan terkait penempatan tersangka atau terdakwa sesuai hasil asesmen, kemudian dalam memutuskan perkara Pasal 127 ayat (1) agar hakim memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) serta menyarankan kepada pembuat UU untuk mengubah kata "dapat" Pasal 103 ayat (1) menjadi kata "wajib" agar sejalan dengan Pasal 54, supaya adanya ketegasan yang mengamanatkan kepada penegak hukum bahwa setiap penyalahguna narkotika sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: *Asesmen, Penyalahguna Narkotika*

**THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED ASSESSMENT TEAM
RECOMMENDATIONS TOWARDS DRUG ADDICT
ON CASE NO. 471/PID.SUS/2019PN.PDG**

*(Dhani Alfarid, 1820112020, Master Degree's Program of Law Faculty,
Andalas University, 162 pages, 2020)*

Abstract

The Implementation of Ordinance No. 35/2009 regarding Narcotics, in order to guarantee the arrangement of medical and social rehabilitation efforts for drug addicts, is very depend on the whole law enforcement agencies and officers. The scopes of the problem in this research are: 1) how does the integrated assessment team recommendations is being applied towards drugs addict at the investigation dan prosecution level on case No. 471/PID.SUS/2019/PN.PDG? ; 2) What are the judges' considerations in criminal proceedings against the defendant of drug addict on case No. 471/PID.SUS/2019PN.PDG? The research is using normative juridical law method, with descriptive approach. From this research, the writer concludes that: 1) the recommendation from the integrated assessment team which clarified the suspect as the victim of narcotics abuse with regular use pattern and allowed to undergo treatment/medication through medical rehabilitation and will be hospitalized in rehabilitation institution in HB Sa'anin Mental Hospital for 6 (six) months (on case No. 471/PID.SUS/2019/PN.PDG), has not been implemented by investigators and prosecutors, since there is no strict regulation which requires the investigators and prosecutors to put suspect or defendant into medical or social rehabilitation institution based on its recommendation, as a result, the suspect or defendant cannot perceived the benefit of the applicable assessment system regulation for his recovery purposes; 2) the considerations of the judges in criminal sentencing against the defendant have not been appropriate with the whole intended instructions as attached in article 127 Ordinance No. 35/2009 regarding Narcotics, which also requires the judges to notice the provisions of article 54, 55 and 103 of its ordinance. Afterwards, the judges also did not take into consideration the result or recommendation from the integrated assessment team and disregard the Circular Letter from the Supreme Court (SEMA) No. 4/2010 regarding The Deployment of Narcotics Abuse and Drug Addicts to A Medical and Social Rehabilitation Institution, so the purpose of law in order to offer the benefit to the defendant related to medications cannot be felt by the defendant. The writer suggested for the investigators and prosecutors can be more involved in implementing regulations concerned with the deployment of the suspect or defendant assessments. And for the judges, in passing the sentence for the defendant related to article 127 verse (1) also have to consider about the provisions of article 127 verses (2) and (3) carefully, and suggested to the law makers to turn the word "can" (as attached in article 103 verse (1)) into the word "must", so, at the end it will be in accordance with article 54. As a result, there should be firmness explicitly, addressed to the law enforcement officers at any level of criminal procedures including judges, that every drug addict, based on the provisions of article 127 verse (1) Ordinance No. 35/2009 regarding Narcotics, is obliged to undergo medical and social rehabilitation.

Keywords: *Assessment, Drug Addict*